



**KONVERGENSI PEMENUHAN LAYANAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING**



Disampaikan Oleh:

**Dr. Hari Nur Cahya Murni**  
DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



# OUTLINE

01

PROGRAM PAUD DALAM 8 AKSI KONVERGENSI

02

PERAN PEMDA DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI  
DALAM PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

**01**

## **PROGRAM PAUD DALAM 8 AKSI KONVERGENSI**

# 5 PILAR STRATEGI NASIONAL DAN UPAYA MANAJERIAL PEMDA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI 8 AKSI KONVERGENSI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## 5 PILAR STRATEGI NASIONAL

1

Komitmen dan Visi pimpinan tertinggi negara

2

Kampanye Nasional berfokus pada, pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas

3

Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat

4

Mendorong kebijakan nutritional *food security*

5

Pemantauan dan evaluasi

Tugas Kemendagri

UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTING PEMDA MELALUI PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI



### Peran Kementerian Dalam Negeri melalui Berdasarkan Pilar 3 Stranas

1. Ditjen Bina Bangda memiliki peran khusus dalam memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan konvergensi intervensi gizi prioritas bagi Rumah Tangga 1000 HPK di lokasi-lokasi prioritas
2. Binwas Provinsi menysasar pelaksanaan aksi konvergensi terkait proses perencanaan dan penganggaran (Aksi-1 hingga Aksi-8) oleh Kabupaten/Kota

Kemendagri memberikan **capacity building** kepada pemerintah provinsi untuk bisa membina dan mengawasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi



# PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI SEBAGAI UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTING



Stunting: Sinyal bahwa ada masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, sehingga pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai serta tidak sampai secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil dan anak-anak usia di bawah dua tahun

Delapan Aksi Konvergensi: Instrument dalam bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran

# Pelaksanaan Aksi Konvergensi Mengikuti Jadwal Reguler Perencanaan & Penganggaran Daerah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BULAN	JADWAL REGULER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	JADWAL PELAKSANAAN & AKSI INTEGRASI			PENANGGUNG JAWAB		
Januari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musrenbang desa</li> <li>Musrenbang kecamatan</li> <li>Rancangan Awal RKPD</li> </ul>	Aksi #1 Analisis Situasi	Aksi #2 Rencana Kegiatan	Aksi #3 Rembuk Stunting	Aksi #6 Sistem Manajemen Data Stunting	Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	Aksi #1: Bappeda (PIC) dan OPD
Februari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagu Anggaran Indikatif</li> <li>Rancangan Renja OPD</li> <li>Forum OPD/Lintas PD</li> </ul>						Aksi #2: Bappeda (PIC) dan OPD
Maret	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan RKPD</li> <li>Musrenbang Kabupaten/Kota</li> </ul>	Aksi #4 Perbup/Perwali tentang Kewenangan Desa	Aksi #5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Aksi #6 Sistem Manajemen Data Stunting	Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	Aksi #4: BPMD	Aksi #3: Sekda dan/atau Bappeda
April	Rancangan akhir RKPD kab/kota						Aksi #5: BPMD
Mei	Rancangan Perbup/Perwali RKPD					Aksi #6: Bappeda (PIC) dan OPD	
Juni	Perbup/Perwali RKPD					Aksi #7: Dinas Kesehatan	
Juli	Penyusunan KUA-PPAS						
Agustus	Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD						
September	Penyusunan RKA OPD						
Oktober	Penyusunan APBD						
November	Pembahasan APBD dengan DPRD						
Desember	Penetapan APBD						
Jan - Feb tahun n+1		Aksi #8 Reviu Kinerja Tahunan					Aksi #8: Sekda dan Bappeda (PIC) dan OPD



Tahap Perencanaan dan Penganggaran



Tahap Pelaksanaan



Tahap Pemantauan dan Evaluasi

# Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi oleh Pemda Kab/Kota Intervensi Selanjutnya Dilaksanakan Penilaian Kinerja oleh Pemerintah Provinsi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Bidang	Perencanaan & Penganggaran	Mobilisasi Peran Stakeholder	Pemanfaatan Data	Evaluasi & Pembelajaran
Aksi Konvergensi	Aksi #1 Analisis Situasi Aksi #2 Rencana Kegiatan	Aksi #3 Rembuk Stunting Aksi #4 Perbup Peran Desa Aksi #5 Pembinaan KPM	Aksi #6 Sistem Manajemen Data Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi <i>Stunting</i>	Aksi #8 Review Kinerja tahunan
Hasil Antara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda mengetahui sebaran angka stunting, gap intervensi, dan kendala penyampaian intervensi</li> <li>Pemda mengetahui prioritas untuk perbaikan dalam alokasi anggaran dan penyampaian layanan</li> <li>Pemda melakukan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan penyampaian layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh tingkat pemerintahan, unit layanan, dan Desa mengetahui peran dan tanggungjawabnya dalam penanganan stunting</li> <li>Unit pemerintahan dan layanan tingkat kecamatan mendapatkan sumber daya yang cukup untuk mendukung layanan di tingkat desa</li> <li>Kader Pembangunan Manusia tersedia di setiap desa untuk mengawal konvergensi layanan tingkat Rumah Tangga</li> <li>Desa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk stunting</li> <li>Desa dapat melakukan kewajiban pelaporannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda dapat mengidentifikasi gap dalam data stunting dan intervensi</li> <li>Pemda melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki gap dalam data stunting dan intervensi</li> <li>Pemda melakukan pengukuran stunting secara regular</li> <li>Pemda mempublikasikan hasil pengukuran stunting dan gap intervensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda melakukan review kinerjanya secara regular</li> <li>OPD dapat melaporkan kegiatan yang berjalan baik, tidak baik dan tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada tahun y.a.d</li> <li>OPD dapat melaporkan kemajuan indikator cakupan layanan dibandingkan dengan baseline serta mengidentifikasi kendala untuk indikator yang lambat kemajuannya</li> <li>Pemda dapat mengidentifikasi perbaikan alokasi anggaran berdasarkan review kinerja</li> </ul>
Hasil Lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi yang diprioritaskan daerah</li> <li>Meningkatnya cakupan rumah tangga 1000 HPK yang mengakses intervensi gizi secara simultan</li> </ol>			

- Fokus pada perbaikan manajemen intervensi gizi spesifik dan sensitive
- Menilai hasil antara dalam upaya penurunan prevalensi stunting
- Memantau kemajuan Indeks Khusus Penanganan Stunting mulai tahun **2018**

# DALAM AKSI 1 ANALIS SITUASI “ CAKUPAN PAUD” MENJADI 1 DIANTARA 20 CAKUPAN YANG DIIDENTIFIKASI PEMENUHANYA PADA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

No	Cakupan layanan Ibu Nifas	Konseling Gizi, Kebersihan, Pengasuhan Orangtua		AIR MINUM DAN SANITASI		PAUD		PERLINDUNGAN SOSIAL			KETAHANAN PANGAN
		Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD	Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda	Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan	Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT	Cakupan desa menerapkan KRPL

Pada Indikator Cakupan Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif terdapat 2 indikator yang berkaitan dengan PAUD yaitu cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting dan cakupan anak usia 2 – 6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD yang sumber datanya diambil dari Dinas Dikbud. Sementara untuk Balita yang dilayani Stumilasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dapat dilakukan oleh guru PAUD yang sudah terlatih dibawah Dinkes Puskesmas Posyandu

**02**

**PERAN PEMDA DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN  
KEMENDAGRI DALAM PENURUNAN STUNTING**

# **Peran Provinsi Dalam Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)**



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

- 1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting , AKI dan AKB**
- 2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal**
- 3. Menetapkan target percepatan penurunan stunting, AKI dan Akb untuk mendukung pencapaian target nasional**
- 4. Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, AKI dan AKB dalam dokumen perencanaan dan penganggaran**
- 5. Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting, AKI dan AKB**
- 6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting, AKI dan AKB**
- 7. Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi**
- 8. Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahan dalam upaya penurunan stunting, AKI dan AKB**

# Peran Kab/Kota Dalam Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting , AKI dan AKB
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal
3. Membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada untuk penurunan stunting , AKI dan AKB
4. Kampanye dan promosi penurunan stunting , AKI dan AKB dengan pendekatan *behavior change communication* (BCC)
5. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan stunting, AKI dan AKB kab/kota
6. Penguatan kapasitas sumberdaya provinsi dan kabupaten/kota
7. Stakeholder learning review pembelajaran antar kabupaten/kota
8. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan AKI dan AKI serta untuk stunting memonitoring dan evaluasi pelaksanaan 8 Aksi penurunan stunting terintegrasi di kab/kota
9. Penilaian kinerja kab/kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan stunting
10. Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam penurunan stunting, AKI dan AKB

# KONVERGENSI MULTI SEKTOR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING PEMDA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## INTERVENSI SPESIFIK Sektor Kesehatan

- 1) Layanan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan balita kurus
- 2) Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri
- 3) Layanan ibu hamil Kontak minimal 4 kali selama kehamilan (K4)
- 4) Pemberian vitamin A untuk balita (6 bulan – 59 bulan)
- 5) Imunisasi dasar lengkap
- 6) Pelayanan ibu Nifas
- 7) Pemberian zinc balita diare
- 8) Balita gizi mendapat perawatan
- 9) ASI eksklusif dan Makanan Pengganti ASI (MP ASI)



## INTERVENSI SENSITIF Sektor Non-Kesehatan

1. Penyediaan sanitasi yang layak
2. Penyediaan air minum yang layak
3. Konseling gizi dan Bina keluarga balita
4. Layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
5. Program perlindungan sosial : JKN/Jamkesda, Program Keluarga Harapan (PKH)
6. Kawasan rumah pangan Lestari

ENABLING  
FACTOR

KEPALA DAERAH & DPRD (Komitmen & Kebijakan)

BAPPEDA (Koordinator Program)

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENURUNAN STUNTING, ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## SPM Bidang Pekerjaan Umum

### ○ KABUPATEN/KOTA

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

## SPM Bidang Pendidikan

### KABUPATEN/KOTA

- Pendidikan anak usia dini

## SPM Bidang Kesehatan

### KABUPATEN/KOTA

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

**Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (1): “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal”.**

# DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGAWALAN PROGRAM DAN KEGIATAN STUNTING DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

1	PERMENDAGRI 100 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TERDAPAT 3 SPM YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENURUNAN STUNTING YAITU KESEHATAN, PU DAN PENDIDIKAN)
2	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH (TERDAPAT 37 SUB KEGIATAN DI 12 PRANGKAT DAERAH )
3	PERMENDAGRI 40 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH TAHUN 2021 (TERDAPAT 35 PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH 12 PRANGKAT DAERAH )
4	PERMENDAGRI 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2021 (PEMERINTAH DAERAH MENSINERGIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, LAMPIRAN BUTIR 77)

**Merupakan payung hukum integrasi antara program dan kegiatan dengan penganggarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah**

# KONTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PENURUNAN STUNTING RANCANGAN RKPD TAHUN 2021



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

No	Urusan	Intervensi Kegiatan
1	Pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)
2	Kesehatan	(a) PMT pemulihan untuk Bumil KEK; (b) Pemberian IFA/Tablet tambah Darah bagi Ibu Hamil. (c) Kelas Ibu Hamil; (d) PMT bagi Balita; Penguatan Fasilitas bagi Posyandu; (e) Pelayanan antenatal Ibu Hamil. Pelayanan postnatal Ibu Bersalin; (f) Pemberian Vitamin A pada Anak 6-59 bulan;(g) Imunisasi Dasar lengkap; (h) Pencegahan dan Penanganan kecacingan pada Balita; (i) Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri; (j) Promosi Penggunaan Jamban Sehat dan cuci tangan pakai sabun; (k) Dukungan fortifikasi pangan; (l) Penanganan balita gizi buruk; (m); Pembinaan MTBS pada Puskesmas; Pencegahan Malaria pada ibu hamil (Daerah endemis); dan (n) Penanganan ibu hamil positif HIV.
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(a) Penyediaan air baku yang layak, dengan upaya pengendalian pencemaran air pada sumber-sumber air; (b) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga;

## Lanjutan....



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

No	Urusan	Intervensi Kegiatan
4	Perumahan dan Permukiman	a) Memperhatikan Kawasan rawan sanitasi ; (b) Membangun tangki septik bagi rumah tangga MBR dan rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka;
5	Sosial	(a) Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH); (b) Fasilitasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi gizi seimbang, ASI, pembatasan Gula, Garam, Lemak (GGL), kesehatan reproduksi dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga
7	Pangan	(a) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan; (b) Kasan Mandiri Pangan
8	Pemberdayaan Masyarakat Desa;	(a) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan sosial budaya dan lingkungan perdesaan melalui: layanan sosial dasar, termasuk penanganan stunting

## Lanjutan....



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

No	Urusan	Intervensi Kegiatan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	(b) Daerah memberikan penghargaan tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa bagi desa yang dapat melakukan upaya konvergensi pencegahan stunting;
		(b) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan sosial budaya dan lingkungan perdesaan melalui: layanan sosial dasar, termasuk penanganan stunting;
8	Pengendalian Penduduk & Keluarga Bencana	(a) Bina Keluarga Balita; (b) Jumlah keluarga yang memiliki balita yang terpapar promosi 1000 HPK
9	Komunikasi dan Informatika	Penyebaran informasi pencegahan stunting (Kampanye Nasional Terkait Stunting) dan Jaminan Kesehatan Nasional
10	Kelautan dan Perikanan	(a) Dukungan terhadap gemar ikan dalam rangka ancaman gizi buruk anak Indonesia (stunting) upaya pemenuhan angka anak Indonesia; (b) Promosi konsumsi hasil kelautan dan perikanan;
11	Urusan Kependudukan dan catatan sipil	(a) Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan dokumen akta kelahiran anak usia 0 s.d. 24 bulan; (b) Kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran.

# Contoh Program Kegiatan Stunting Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 (Provinsi)



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

KODE					
URUSAN	SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
Kesehatan	2	2	1.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	2	2	1.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
	2	2	1.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
	2	2	1.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	2	2	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	2	2	1.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	2	5	1.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	3	1.01	3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
	3	3	1.01	4	Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan
	3	4	1.01	8	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	3	5	1.01	2	Pemicuan PHBS dan Pembinaan Penyediaan Prasarana cubluk
	3	5	1.01	3	Penyediaan Tangki Septik
Sosial	6	5	1.02	1	Pendataan fakir miskin lintas daerah Kab/kota
	6	5	1.05	2	Pengelolaan fakir miskin lintas daerah Kab/kota

# Lanjutan....



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	SUB KEGIATAN				
Pangan	9	3	1.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	3	1.04	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal
	9	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	3	1.01	3	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	4	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	8	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	9	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
	14	4	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
	14	4	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

# Lanjutan....



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	SUB KEGIATAN				
Pangan	9	3	1.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	3	1.04	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal
	9	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	3	1.01	3	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	4	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	8	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	9	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
	14	4	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
	14	4	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

# Lanjutan....



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	SUB KEGIATAN				
Kesehatan	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Pendidikan	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Lanjutan....



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	SUB KEGIATAN				
Sosial	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pangan	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Lingkungan Hidup	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Lanjutan....



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	SUB KEGIATAN				
Sosial	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pangan	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Lingkungan Hidup	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Lanjutan....



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA

URUSAN	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
	SUB KEGIATAN				
Kependudukan dan catatan sipil	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pengendalian penduduk dan KB	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi,
	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	14	3	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran



Terima Kasih